

AKALAH
INSTRUMEN KEUANGAN, KAS, DAN PIUTANG

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M. Pd.



Disusun Oleh: Kelompok 2 (24 A)

Laila Asia Somad 2413031005

Mourien Ganesti 2413031013

Revie Nevilla Extin 2413031027

Reyhta Putri Herdian 2413031035

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Instrumen Keuangan, Kas, dan Piutang”** tepat pada waktunya. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang diampu oleh Dr. Pujiati, M.Pd.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep dasar serta penerapan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, pengelolaan kas, dan piutang dalam praktik akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa lain yang ingin memahami lebih dalam tentang pentingnya instrumen keuangan dalam laporan keuangan perusahaan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Pujiati, M.Pd. selaku dosen pengampu, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dan bantuan selama proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2025

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Konsep Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan.....	4
2.1.1 Pengakuan Instrumen Keuangan.....	4
2.1.2 Pengukuran Instrumen Keuangan	5
2.1 Aset Keuangan.....	6
2.2.1 Kategori Aset Keuangan	6
2.3 Pengendalian Kas.....	8
2.3.1 Bentuk Bentuk Pengendalian Kas.....	10
2.4 Sistem Imprest Kas Kecil.....	11
2.5 Pengertian dan Pengakuan Piutang.....	12
2.5.1 Penilaian dan Perhitungan Penurunan Nilai Piutang	16
2.5.2 Penyajian dan Pengungkapan Piutang Dalam Laporan	20
2.5.3 Analisis Kas dan Piutang.....	21
BAB III PENUTUP	25
3.1 Kesimpulan.....	25
3.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
STUDI KASUS	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia perusahaan dan keuangan yang semakin kompleks menuntut adanya sistem akuntansi yang mampu menyajikan informasi keuangan secara akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Salah satu aspek penting dalam pelaporan keuangan adalah pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Instrumen keuangan memegang peranan signifikan dalam kegiatan ekonomi modern karena hampir setiap entitas, baik sektor publik maupun swasta, terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan aset keuangan, kewajiban keuangan, atau instrumen ekuitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep instrumen keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mengadopsi IFRS 9 menjadi hal yang sangat penting bagi praktisi maupun akademisi di bidang akuntansi.

PSAK 71 mengatur secara komprehensif bagaimana entitas mengakui, mengukur, dan menyajikan instrumen keuangan dalam laporan keuangannya. Standar ini menggantikan PSAK 55 dan menekankan pada pendekatan berbasis model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Melalui pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu menilai risiko kredit dan nilai wajar dari instrumen keuangan secara lebih realistis dan transparan. Pengakuan dan pengukuran yang tepat tidak hanya memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan perusahaan, tetapi juga membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat.

Selain instrumen keuangan secara umum, aset keuangan juga menjadi bagian penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan berpotensi menghasilkan manfaat di masa depan. Aset keuangan dapat berupa kas, piutang, atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dalam praktiknya, pengelolaan aset keuangan memerlukan kebijakan yang hati-hati agar terhindar dari risiko keuangan, seperti gagal bayar piutang atau fluktuasi nilai pasar.

Menurut Martani et.al (2016:196), piutang adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang atau entitas berhak mendapatkan pelunasan dalam bentuk uang atas transaksi kepada pihak lain. Piutang sebagai salah satu bentuk aset keuangan memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga likuiditas perusahaan. Pengelolaan piutang yang baik dapat meningkatkan arus kas masuk, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, serta mengurangi risiko tidak tertagihnya pendapatan. Oleh karena itu, pengakuan, pengukuran, dan penilaian piutang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku agar nilai yang tercatat di laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, aspek pengendalian kas juga tidak kalah penting dalam sistem akuntansi keuangan. Kas merupakan aset paling likuid yang sangat mudah digunakan dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, kecurangan, atau kesalahan dalam pengelolaan kas. Pengendalian kas yang baik akan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai instrumen keuangan, aset keuangan, piutang, dan pengendalian kas merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik akuntansi. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep tersebut sangat diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi keuangan dalam suatu entitas. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan standar akuntansi keuangan dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan serta penerapan pengendalian yang efektif terhadap aset, khususnya piutang dan kas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan instrumen keuangan dan bagaimana konsep pengakuan serta pengukurannya berdasarkan PSAK 71?
2. Bagaimana klasifikasi dan pengelolaan aset keuangan dalam laporan keuangan perusahaan?

3. Bagaimana sistem pengendalian kas yang efektif dapat diterapkan dalam suatu entitas bisnis?
4. Apa pengertian, pengakuan, dan penilaian piutang dalam laporan keuangan?
5. Bagaimana penerapan sistem imprest kas kecil serta pencatatannya dalam praktik akuntansi?

1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dasar, pengakuan, dan pengukuran instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2. Mengetahui klasifikasi aset keuangan serta implikasinya terhadap laporan keuangan perusahaan.
3. Menjelaskan pentingnya sistem pengendalian kas dalam menjaga keamanan dan keandalan transaksi keuangan perusahaan.
4. Memahami proses pengakuan, penilaian, dan penyajian piutang agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
5. Menggambarkan penerapan sistem imprest kas kecil dan pencatatannya sebagai bagian dari pengendalian internal perusahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah salah satu elemen penting dalam laporan keuangan modern karena hampir semua kegiatan bisnis melibatkan transaksi keuangan, baik berupa aset maupun kewajiban. Menurut PSAK 71 (2017), instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Definisi ini senada dengan IFRS 9 yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB, 2014), yang menekankan bahwa instrumen keuangan selalu menciptakan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu pihak yang memperoleh hak atas arus kas masa depan (aset keuangan) dan pihak yang berkewajiban memenuhi pembayaran (liabilitas keuangan).

2.1.1 Pengakuan Instrumen Keuangan

Pengakuan merupakan tahap awal yang menentukan kapan suatu instrumen keuangan dicatat dalam laporan keuangan. Pengakuan dilakukan ketika perusahaan telah menjadi salah satu pihak dalam kontrak instrumen keuangan tersebut (IAI, 2017). Dengan kata lain, pengakuan berfokus pada momen ketika hak dan kewajiban kontraktual mulai berlaku.

Untuk aset keuangan, pengakuan dilakukan ketika perusahaan memperoleh hak kontraktual untuk menerima arus kas. Misalnya, dalam kasus piutang usaha, perusahaan mengakuinya pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan dan transaksi penjualan telah dicatat, meskipun pembayaran baru akan diterima kemudian (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018). Pada sisi lain, liabilitas keuangan diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban kontraktual, misalnya ketika perusahaan menerima pinjaman dari bank, maka kewajiban pinjaman dicatat sebagai liabilitas keuangan sejak dana diterima.

Selain pengakuan awal, terdapat pula konsep penghentian pengakuan atau *derecognition*. Aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak kontraktual arus kas telah kadaluarsa atau dialihkan kepada pihak lain secara substansial, misalnya melalui transaksi penjualan piutang. Demikian juga, liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya apabila kewajiban telah diselesaikan, dibatalkan, atau kadaluarsa (Stice, Stice, & Skousen, 2019). Konsep ini penting untuk menjaga agar laporan keuangan hanya memuat instrumen yang benar-benar masih menjadi hak atau kewajiban perusahaan.

2.1.2 Pengukuran Instrumen Keuangan

Setelah diakui, instrumen keuangan harus diukur agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai nilai ekonominya. Menurut PSAK 71, pengukuran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengukuran awal dan pengukuran setelah pengakuan awal (IAI, 2017).

Pada saat pengakuan awal, instrumen keuangan dicatat sebesar nilai wajar. Jika instrumen tersebut tidak dikategorikan dalam kelompok nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), maka biaya transaksi yang terkait akan ditambahkan ke nilai aset atau dikurangkan dari nilai liabilitas. Misalnya, apabila perusahaan membeli obligasi senilai Rp1.000.000 dengan biaya administrasi Rp10.000, maka nilai perolehan yang diakui adalah Rp1.010.000.

Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen yang ditahan hingga jatuh tempo dengan arus kas kontraktual berupa pokok dan bunga akan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*). Instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), di mana perubahan nilai langsung memengaruhi laporan laba rugi. Sementara itu, instrumen yang dapat ditahan sekaligus dijual dapat diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), di mana perubahan nilai akan dicatat di bagian ekuitas sebelum diakui dalam laba rugi saat dilepas (IASB, 2014).

Hal yang juga menjadi ciri utama PSAK 71 adalah pengenalan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) dalam menghitung penurunan nilai (*impairment*). Model ini berbeda dengan PSAK lama yang menggunakan pendekatan *incurred loss*. Dengan ECL, perusahaan diwajibkan mengantisipasi kerugian kredit potensial sejak awal, bahkan sebelum kerugian benar-benar terjadi. Sari dan Rahmawati (2020) menyatakan bahwa penerapan model ini memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi risiko kredit dan informasi yang lebih relevan bagi pemakai laporan keuangan.

2.2 Aset Keuangan

Aset keuangan adalah salah satu bentuk instrumen keuangan yang paling sering ditemui dalam praktik bisnis sehari-hari. PSAK 71 menjelaskan bahwa aset keuangan mencakup kas, instrumen ekuitas yang dimiliki pada entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas, maupun kontrak yang akan diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas (IAI, 2017). Artinya, aset keuangan mencerminkan sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat berupa arus kas di masa depan.

2.2.1 Kategori Aset Keuangan

1. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value Through Profit and Loss/FVTPL*)

Kategori pertama ini biasanya digunakan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau memang sejak awal ditetapkan oleh entitas untuk diukur dengan nilai wajar. Artinya, setiap perubahan nilai pasar dari instrumen keuangan tersebut langsung dicatat dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, keuntungan atau kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga instrumen dapat segera terlihat pada periode berjalan. Instrumen yang termasuk dalam kategori ini misalnya saham atau obligasi yang dibeli dengan tujuan spekulasi jangka pendek. Karena sifatnya yang aktif diperdagangkan, FVTPL memberikan gambaran lebih nyata

mengenai potensi laba atau rugi yang dihadapi perusahaan dari aktivitas investasi jangka pendek (Indriani & Sari, 2021).

2. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (*Held to Maturity/HTM*)

Kategori kedua adalah investasi yang berupa instrumen keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap (*fixed payments*) dan tanggal jatuh tempo tertentu. Contohnya obligasi pemerintah atau obligasi korporasi yang dibeli dengan maksud disimpan sampai akhir periode jatuh tempo. Syarat utama agar instrumen bisa dikategorikan sebagai HTM adalah perusahaan harus memiliki niat dan kemampuan untuk menahannya hingga jatuh tempo. Jika entitas menjual sebagian instrumen HTM sebelum jatuh tempo (kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan), maka klasifikasi HTM untuk seluruh instrumen serupa bisa hilang. Kelebihan dari kategori ini adalah stabilitas arus kas karena nilai investasi relatif pasti jika memang ditahan hingga jatuh tempo (Scott, 2015).

3. Pinjaman yang diberikan atau piutang (*Loans and Receivables/LR*)

Kategori ketiga adalah aset keuangan berupa pinjaman atau piutang yang diberikan kepada pihak lain, dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan jumlahnya, tetapi tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif. Contohnya termasuk piutang usaha dari pelanggan, pinjaman bank kepada nasabah, atau pinjaman antar perusahaan.

Pinjaman dan piutang biasanya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, menggunakan metode suku bunga efektif. Keunggulan kategori ini adalah kepastian pembayaran pokok dan bunga, meskipun terdapat risiko gagal bayar dari pihak peminjam. Karena tidak memiliki harga pasar, nilai wajar pinjaman atau piutang biasanya ditentukan dengan pendekatan diskonto atas arus kas masa depan (Baridwan, 2020).

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available for Sale/AFS*)

Kategori keempat adalah aset keuangan yang bersifat non-derivatif, namun tidak dimasukkan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Instrumen AFS bisa berupa saham, obligasi, atau

instrumen keuangan lainnya yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan secara aktif, tetapi juga tidak dimaksudkan untuk ditahan hingga jatuh tempo. Karakteristik utamanya adalah perubahan nilai wajar aset AFS tidak langsung masuk ke laporan laba rugi, melainkan diakui dalam ekuitas pada bagian "penghasilan komprehensif lain". Baru ketika aset tersebut dijual, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya ada di ekuitas akan direklasifikasi ke laba rugi. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi entitas dalam mengelola portofolio investasi jangka menengah hingga panjang, sekaligus menjaga stabilitas laba agar tidak terlalu fluktuatif akibat perubahan nilai pasar jangka pendek (Susanto & Nurdin, 2019).

2.3 Pengendalian Kas

Berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa lancar kas masuk dan kas keluar ditangani. Kas ialah alat pembayaran yang dapat digunakan setiap saat untuk mendanai berbagai macam kegiatan yang dilakukan organisasi, lembaga, atau bisnis (Pramono 2021:3). Kas menjadi aset yang paling mudah diakses yang mencakup hal-hal seperti uang tunai, saldo rekening bank, dan investasi jangka pendek yang berfungsi sebagai sumber kehidupan perusahaan. Arus kas yang dikelola dengan cara yang salah dapat menyebabkan ketidakstabilan antara pemasukan dan pengeluaran. Ini berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, di mana jika uang tunai yang tersedia sangat minim, hal ini dapat menciptakan kekurangan dana yang menyebabkan gangguan pada operasi perusahaan serta kesulitan dalam memenuhi pengeluaran yang tak terduga. Di sisi lain, jika kas yang dimiliki perusahaan berlebih, hal ini dapat mengakibatkan pemborosan yang merugikan perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki dana yang diperlukan untuk operasionalnya. Dana ini berfungsi sebagai alat transaksi dan juga sebagai parameter dalam akuntansi yang mencakup kekayaan perusahaan yang sangat cair karena kemudahan penggunaannya serta pergerakannya yang cepat. Oleh karena itu, dana ini sangat rentan terhadap tindakan kecurangan. Mengingat sifatnya yang

sangat cair dan gampang untuk disalahgunakan, diperlukan adanya sistem pengendalian internal dalam pengelolaannya. Sistem pengendalian internal kas ialah segala sesuatu yang berupa fasilitas, instrumen, dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi keamanan kas, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan, memastikan akurasi serta keandalan data akuntansi yang berkaitan dengan kas, mendukung pencapaian efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang mengatur pengelolaan kas (Pramono 2021:8;). Dengan sistem pengendalian internal yang memadai, manajemen perusahaan akan lebih mampu untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penilaian. Sistem pengawasan atau pengendalian internal terhadap kas perlu dilakukan agar dapat mengamankan aset yang dimiliki, mendorong terjadinya efisiensi operasional perusahaan dan dapat menjamin ketepatan dan dipercayanya catatan-catatan akuntansi (Baroroh et al., 2023:59).

Konsep Pengendalian Intern dari Organisasi Komite Sponsor Treadway Commission (COSO) diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan beberapa penyesuaian pada sub-komponen tertentu berdasarkan berbagai acuan lainnya. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan kepastian dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keandalan laporan keuangan, menjaga aset, dan memastikan patuhan terhadap regulasi. Elemen-elemen SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mencakup Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. Kelima elemen SPIP ini memiliki peran penting, tetapi yang paling relevan untuk pengeluaran kas adalah Kegiatan Pengendalian, karena unsur-unsur dalam Kegiatan Pengendalian lebih berkaitan dengan pengeluaran kas, sedangkan empat elemen lainnya bersifat lebih umum untuk seluruh aktivitas instansi.

2.3.1 Bentuk Bentuk Pengendalian Kas

1. Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam membangun pengendalian internal yang kuat adalah dengan memisahkan dengan jelas tugas-tugas dari berbagai aktivitas terkait kas. Ini termasuk membedakan antara pekerja yang bertugas menerima dan mengeluarkan kas, mencatat transaksi , dan memberikan wewenang atas arus masuk dan keluar kas dan bank. Anggota staf yang merekonsiliasi rekening bank tidak boleh sama dengan orang yang bekerja pada buku-buku bank, untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang dapat menyebabkan penipuan atau kesalahan.

2. Proses Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi rekening bank merupakan langkah penting dalam mengonfirmasi ketepatan catatan keuangan. Prosedur ini harus dilakukan setiap bulan secara teratur, membandingkan semua transaksi kas dan bank dengan laporan bank resmi. Rekonsiliasi harus ditinjau dan disetujui oleh kepala departemen akuntansi untuk memastikan keakuratan dan mengidentifikasi perbedaan sejak dini, meminimalkan kemungkinan manipulasi atau kesalahan data.

3. Gunakan Sistem Imprest Fund Untuk Mengelola Kas Kecil

Cara terbaik bagi bisnis untuk mengelola kas kecil secara efektif adalah dengan menggunakan sistem imprest fund. Sistem ini memastikan bahwa jumlah kas kecil selalu dalam kisaran tertentu dengan mengisi kembali dana tetap secara teratur sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah . Pendekatan ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana kecil dan membuatnya lebih mudah untuk memantau pengeluaran harian yang tidak memerlukan proses pencairan yang rumit.

4. Mengelola dan Menyimpan Uang Tunai dengan Aman

Untuk meminimalkan risiko pencurian atau penyalahgunaan, uang tunai harus ditangani dengan hati-hati. Semua uang tunai harus disimpan di lokasi yang aman, seperti kotak uang, brankas , atau rekening bank , setidaknya sehari setelah diterima. Selain itu, hindari menyimpan terlalu

banyak uang tunai di rekening giro Anda atau membiarkannya menganggur. Sebaliknya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga likuiditas sambil menghindari kerugian akibat inflasi atau pencurian.

5. Mengelola Pembayaran Tunai dan Cek

Untuk menghindari penyalahgunaan, produksi cek dan uang tunai memerlukan pemantauan yang ketat . Untuk mencegah manipulasi, hindari menandatangani cek dalam bentuk kosong, setiap tanda tangan harus didukung oleh dokumentasi, seperti faktur atau tanda terima, setidaknya dua orang yang berwenang harus menandatangani cek dan transaksi giro untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kemungkinan penipuan atau pengeluaran yang tidak sah.

6. Melindungi dari Risiko Penipuan dan Kasir

Untuk melindungi aset perusahaan dari kemungkinan penipuan oleh kasir, terapkan mekanisme keamanan, seperti obligasi kasir atau asuransi. Jika terjadi kerugian kas akibat penipuan, seperti penggelapan, langkah ini berfungsi sebagai jaring pengaman finansial . Hasilnya, bisnis dapat memulihkan kerugian lebih cepat dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar dari karyawan yang menangani kas.

7. Penggunaan Dokumen Pendukung Standar

Untuk mencegah duplikasi atau kesalahan pembayaran, dokumentasi pendukung harus dikelola secara sistematis. Setiap transaksi yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas harus menggunakan tanda terima resmi bernomor. Untuk mencegah kemungkinan proses pembayaran ganda, yang dapat membahayakan integritas catatan keuangan dan efisiensi operasional, semua dokumentasi pendukung harus dicap " lunas " atau " lunas " setelah pembayaran dilakukan.

2.4 Sistem Imprest Kas Kecil

Sistem imprest adalah metode pembukuan kas kecil dimana jumlah rekening kas kecil selalu tetap. Setiap terjadi pengeluaran pemegang kas kecil tidak langsung melakukan pencatatan, tetapi hanya mengumpulkan bukti-bukti pengeluarannya. Pada waktu yang telah ditetapkan yaitu pada saat pengisian

kembali kas kecil baru dilakukan pembukuan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, kemudian pemegang kas kecil mengajukan pembentukan dana kas kecil kepada bendahara kas yang besarnya sesuai dengan pembukuan dan buktibukti pengeluaran, sehingga dana kas kecil tetap sama dengan jumlah di awal.

Sistem imprest

1. Saldo dalam akun Kas Kecil selalu tetap.
2. Setiap terjadi pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat, tetapi bukti-bukti pengeluarannya saja yang dikumpulkan. Pencatatan hanya terjadi pada waktu pengisian kembali jumlah fisik kas kecil yang didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang jumlahnya relatif sudah cukup besar.
3. Saldo akun Kas Kecil baru berubah apabila
 - a) Terdapat adanya penambahan dana kas kecil.
 - b) Terdapat adanya pengurangan dana kas kecil.
4. Apabila pada akhir periode belum ada pengisian kembali atas jumlah fisik kas kecil (karena jumlah pengeluarannya relatif masih kecil), maka perlu dilakukan *adjustment* terhadap jumlah pengeluaran kas kecil yang belum diganti tersebut. Kemudian jurnal *adjustment* tersebut perlu di jurnal balik pada awal periode berikutnya untuk mengembalikan saldo akun kas kecil pada jumlahnya yang tetap seperti semula.

2.5 Pengertian dan Pengakuan Piutang

Menurut Kieso et al. (2019) piutang merupakan aset keuangan yang biasa disebut dengan pinjaman dan piutang yang dimana perusahaan memiliki hak untuk mengajukan penagihan sejumlah uang terhadap pelanggan atas uang, barang maupun jasa.

Pendapat lain menurut Martani et al. (2016:196), definisi piutang adalah “Klaim suatu perusahaan pada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan/pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya”.

“Piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan dan organisasi lain. Piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar”. (Warren et al., 2017:440)

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa pengertian piutang diatas yang dimana piutang adalah tagihan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang berdasarkan dengan perjanjian dan persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maka pada masa yang akan datang tentunya terdapat penerimaan kas yang terkait dengan pelunasannya. Piutang umumnya diakui pada saat hak milik beralih ke pembeli. Biasanya hal ini disebut dengan accrual basis yang dimana dalam penggunaannya akan menimbulkan pengakuan terhadap penghasilan – penghasilan yang masih akan diterima.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2015) memberikan pernyataan terkait penyusunan laporan keuangan, yaitu: Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Sehingga pencatatan yang dilakukan sebaiknya menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Prosedur pencatatan piutang terdiri dari pengakuan piutang, penerimaan piutang, pencatatan piutang ragu-ragu, pencatatan penyisihan piutang, dan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur.

Martani et al. (2016:204) menyatakan bahwa “Pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 Paragraf 4.1.1 tahun 2017, menyatakan bahwa: Entitas mengklasifikasikan aset

keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi. Selain itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 dalam Paragraf 5, juga menyatakan bahwa: Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan: (a) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan yang dapat terjadi; (b) nilai waktu atas uang; dan (c) informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan pada saat mengakui adanya transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, yaitu sebagai berikut.

Piutang Usaha	xxx	
Penjualan		xxx

Ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat menerima pembayaran piutang dari pelanggan tanpa adanya diskon adalah sebagai berikut.

Kas	xxx	
Piutang Usaha		xxx

Ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat menerima pembayaran piutang dari pelanggan yang mendapatkan diskon adalah sebagai berikut.

Kas	xxx	
Potongan Penjualan	xxx	
Piutang Usaha		xxx

Contoh Soal :

Entitas ABC memiliki kasir untuk mengelola pengeluaran kas untuk keperluan operasi entitas. Entitas menentukan jumlah kas kecil sebesar Rp 10.000.000,00. Entitas menentukan jumlah kas kecil minimal dalam entitas Rp 1.000.000,00. Pada 1 Desember 20X1 membentuk kas kecil sebesar Rp 10.000.000,00. Untuk itu perusahaan menarik cek dari bank, kemudian uang tersebut dikelola oleh kasir.

Kas kecil Rp 10.000.000,00

Kas di bank Rp 10.000.000,00

Kas kecil tersebut digunakan untuk beberapa keperluan berikut ini.

- a. Membayar konsumsi rapat pada 1 Desember 20X1 sebesar Rp 500.000,00
Desember 20X1 sebesar Rp 2.500.000,00
- b. Membayar biaya transportasi untuk pengiriman pada 12 Desember 20X1 sebesar Rp 3.000.000,00
- c. Membayar biaya pemeliharaan 15 Desember 20X1 sebesar Rp 2.000.000,00

Pada saat pengeluaran tersebut, entitas tidak membuat jurnal, namun tetap membuat dokumen pengeluaran dan membuat daftar pengeluaran tersebut dalam catatan entitas. Pada 20 Desember dilakukan penggantian uang kas kecil. Dana yang terpakai Rp 8.000.000,00, dana yang tersisa sebesar Rp 2.000.000,00. Untuk itu dibuat cek untuk mengganti kas kecil. Pada saat penggantian kas kecil dibuat jurnal pengeluaran kas yang terjadi dan kas di bank.

Beban konsumsi	Rp 500.000,00	
Beban gaji	Rp 2.500.000,00	
Beban transportasi	Rp 3.000.000,00	
Beban pemeliharaan	Rp 2.000.000,00	
Kas di bank		Rp 8.000.000,00

Setelah jurnal di atas, maka semua pengeluaran akan dicatat menjadi beban. Saldo kas kecil akan kembali sebesar dana kas kecil yang dibentuk awal yaitu Rp.10.000.000,00

2.5.1 Penilaian dan Perhitungan Penurunan Nilai

Menurut Kieso et.al (2017:427), piutang merupakan aset keuangan dan juga instrument keuangan. Dalam laporan keuangan, aktivitas akuntansi yang berkaitan dengan piutang usaha sangatlah krusial karena selaras dengan prinsip bersikap hati-hati atau prinsip konservatisme. Tujuannya adalah supaya entitas bisnis mampu memaparkan laporan finansial secara cermat dan tanpa kesalahan. Implementasi dari teori akuntansi yang sesuai, terutama yang berhubungan dengan piutang dagang, wajib dikerjakan dengan cara yang adil dan teratur.

Pelaporan piutang yang tertera dalam laporan posisi keuangan mencakup (1) Klasifikasi dan (2) Penilaian. Perusahaan mengklasifikasi kan piutang yang ditargetkan untuk dijadikan penilaian penagihan. Proses pengklasifikasian ini melibatkan penentuan waktu setiap piutang yang akan ditagih, apakah dalam satu tahun atau dalam siklus operasi yang lebih lama, diidentifikasi sebagai aset lancar. Semua piutang lainnya akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan melakukan penilaian dan melaporkan piutang jangka pendek berdasarkan nilai realisasi kas yang diharapkan, yaitu jumlah bersih yang akan diterima dalam bentuk kas. Penetapan nilai realisasi kas ini memerlukan perkiraan mengenai piutang yang mungkin tidak tertagih serta kemungkinan retur atau diskon yang akan diterapkan.

Ketika piutang usaha dianggap tidak tertagih, piutang tersebut harus dihapus dari catatan keuangan perusahaan. Tindakan ini mengurangi nilai piutang yang dapat dipulihkan dan mengakibatkan beban atau kerugian bagi perusahaan. Ada dua metode akuntansi utama yang digunakan untuk mencatat piutang usaha yang tidak tertagih: 1)metode penghapusan langsung (direct write off method) dan 2) metode penyisihan. Metode penghapusan langsung mengakui beban piutang tak tertagih hanya ketika suatu akun secara

definitif dianggap tidak tertagih. Pada dasarnya , beban tersebut diakui hanya setelah terbukti bahwa piutang tersebut tidak dapat dipulihkan. Sedangkan, metode cadangan mengedepankan strategi penyisihan bertahap dengan menggunakan jumlah yang relatif kecil. Diperkirakan sebagian dari keseluruhan piutang perusahaan akan tertagih , sementara sebagian lainnya tidak akan tertagih. Oleh karena itu, perusahaan mengantisipasi sebagian piutang yang kemungkinan tidak tertagih dan membentuk cadangan untuk jumlah estimasi tersebut.

1. Metode Penghapusan Langsung (*direct write off method*)

Menurut metode penghapusan langsung (*direct write-off method*), Ketika perusahaan menentukan bahwa piutang tertentu dianggap tidak dapat ditagih, perusahaan akan membebankan kerugian tersebut ke Beban Piutang Tak Tertagih.

Contoh :

Pada 10 Desember Cruz Co. menghapus piutang dari saldo piutang Yusado sebesar \$8.000, jurnalnya adalah sebagai berikut:

10 Desember

Beban Piutang Tidak Tertagih	8.000
Piutang-Yusado	8.000

(Untuk mencatat penghapusan piutang Yusado)

Dengan menggunakan metode ini, Beban Piutang Tak Tertagih akan secara eksklusif mencerminkan kerugian aktual yang terjadi akibat piutang tak tertagih. Jumlah total piutang adalah yang akan dilaporkan oleh perusahaan. Mereka yang menganjurkan metode penghapusan langsung, yang sering digunakan untuk tujuan perpajakan yang menyatakan bahwa metode ini mendokumentasikan fakta, bukan estimasi. Metode ini menyatakan bahwa setiap penjualan menghasilkan piutang yang baik, dan piutang tertentu menjadi tidak tertagih dan tidak berharga karena peristiwa tertentu. Dari sudut pandang praktik, penerapan metode ini mudah dan sederhana. Namun demikian, metode penghapusan

langsung memiliki kelemahan teoretis. Biasanya, metode ini gagal mencocokkan biaya dengan pendapatan secara tepat dalam jangka waktu yang relevan. Selain itu, metode ini tidak memastikan bahwa piutang dalam laporan posisi keuangan dilaporkan pada nilai realisasi bersihnya. Akibatnya, penggunaan metode penghapusan langsung tidak dianggap sesuai kecuali jumlah yang tidak tertagih tidak signifikan.

2. Metode Penyisihan (*allowance method*)

Metode Penyisihan (*allowance method*), Proses akuntansi terkait dengan piutang yang berpotensi tidak dapat ditagih melibatkan perhitungan estimasi piutang yang tidak dapat direalisasikan pada setiap akhir periode pelaporan. Teknik ini memberikan kondisi yang lebih tepat dalam menghubungkan antara pendapatan dan biaya yang relevan pada laporan kinerja keuangan. Selain itu, metode ini memastikan bahwa nilai piutang entitas bisnis dicatat dalam laporan posisi keuangan dengan memperhitungkan nilai kas yang dapat direalisasikan. Nilai kas yang dapat direalisasikan merupakan jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima oleh entitas bisnis dalam bentuk uang tunai. Nilai ini tidak termasuk jumlah yang diestimasi oleh entitas bisnis sebagai tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, teknik ini mengurangi nilai piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar estimasi jumlah yang tidak dapat ditagih.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) mewajibkan penggunaan metode penyisihan ini untuk tujuan pelaporan keuangan ketika nilai piutang yang berpotensi tidak tertagih signifikan secara material. Metode ini memiliki tiga karakteristik utama:

- a. Entitas bisnis membuat estimasi mengenai piutang yang tidak dapat ditagih. Entitas bisnis mengalokasikan estimasi beban ini ke pendapatan dalam periode akuntansi yang sama di mana pendapatan tersebut diakui.
- b. Entitas bisnis mencatat estimasi piutang tidak tertagih sebagai debit pada akun Beban Piutang Tidak Tertagih dan mengkreditnya ke akun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (sebagai akun kontra aset) melalui jurnal penyesuaian pada setiap akhir periode akuntansi.

- c. Pada saat entitas bisnis menghapus piutang tertentu, mereka mencatat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sebagai debit pada akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkreditnya ke akun Piutang.

Mencatat estimasi piutang tidak tertagih ,untuk mengilustrasikan metode penyisihan.

Contoh:

Brown Furniture memiliki penjualan kredit sebesar \$1.800.000 pada tahun 2011. Dari jumlah ini, sebesar \$150.000 masih belum tertagih pada 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa \$10.000 penjualan tersebut tidak akan tertagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi piutang tidak tertagih sebagai berikut:

31 Desember

Beban Piutang Tidak Tertagih	10.000
Penyisihan Piutang Tidak tertagih	10.000
<i>(Untuk mencatat estimasi piutang tidak tertagih)</i>	

Brown menyajikan Beban Piutang Tak Tertagih dalam laporan laba rugi bersama dengan angka penjualan untuk tahun 2011. Brown mengklasifikasikan beban ini dalam bagian beban operasional untuk tahun tersebut. Oleh karena itu , terdapat korelasi langsung antara estimasi piutang tak tertagih dan penjualan. Seperti yang ditunjukkan pada Ilustrasi 7-6, perusahaan mengurangi akun penyisihan dari piutang usaha dalam bagian aset lancar pada laporan posisi keuangan.

Brown Furniture

Laporan Posisi keuangan (Parsial)

Aset lancar

Persediaan barang dagangan	\$300.000
----------------------------	-----------

Biaya dibayar di muka	25.000
Piutang	150.000
Dikurang: Penyisihan piutang tidak tertagih (10.000)	(140.000)
Kas	15.000
Total aset lancar	\$480.000

Penyisihan Piutang menggambarkan perkiraan total tagihan dari konsumen yang diprediksi tidak dapat dikumpulkan oleh entitas bisnis di waktu mendatang. Entitas bisnis menggunakan akun penyeimbang dan tidak langsung mengurangi akun Piutang karena tidak memahami pelanggan spesifik mana yang tidak akan melakukan pembayaran. Saldo kredit di akun cadangan akan "menyerap" penghapusan piutang tertentu saat hal tersebut terjadi. bisnis tidak menutup akun Penyisihan Piutang pada penutupan tahun fiskal.

2.5.2 Penyajian dan Pengungkapan Piutang Dalam Laporan Keuangan

a. Penyajian Piutang dalam Laporan Keuangan

Menurut Martani (2012), penyajian piutang dalam laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Piutang dagang dicantumkan dalam neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca, yaitu dalam nilai bruto setelah dikurangi estimasi kerugian piutang yang tidak tertagih.
2. Apabila perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang dagang, maka harus diberikan keterangan dalam neraca bahwa saldo piutang dagang yang disajikan merupakan nilai bersih (neto).
3. Jika saldo piutang dagang bersifat material pada tanggal neraca, maka perlu disajikan rincian piutang tersebut dalam neraca.
4. Piutang dagang yang memiliki saldo kredit harus dimasukkan ke dalam kelompok utang lancar.

5. Apabila jumlahnya tergolong material, piutang non-dagang wajib disajikan secara terpisah dari piutang dagang.

b. Pengungkapan Piutang

Selain penyajian di neraca, perusahaan juga diwajibkan mengungkapkan informasi tambahan mengenai piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Menurut PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, perusahaan harus memberikan rincian yang cukup agar pengguna laporan memahami sifat, risiko, dan nilai wajar dari piutang yang dimiliki. Bentuk pengungkapan piutang umumnya meliputi:

1. Rincian umur piutang (*aging schedule*), yaitu pengelompokan piutang berdasarkan lama keterlambatan pembayaran, seperti belum jatuh tempo, lewat 30 hari, 60 hari, hingga lebih dari 120 hari. Informasi ini penting untuk menilai risiko piutang tak tertagih.
2. Penurunan nilai piutang, yang dijelaskan secara terperinci apakah dilakukan secara individu (untuk pelanggan tertentu) atau kolektif (berdasarkan kelompok pelanggan yang homogen).
3. Nilai wajar piutang, yaitu nilai yang mencerminkan estimasi harga pasar atau nilai realisasi bersih pada tanggal pelaporan.
4. Pengungkapan piutang yang dijaminkan, yaitu informasi apabila sebagian piutang digunakan sebagai agunan atas pinjaman, sesuai dengan ketentuan PSAK 60.

2.5.3 Analisis Kas dan Piutang

a. Analisis Kas

Analisis kas merupakan proses penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola dana tunai secara

efektif untuk mendukung kegiatan operasional dan menjaga likuiditas. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengetahui sejauh mana kas digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek serta mempertahankan keseimbangan arus kas masuk dan keluar (Kasmir, 2019). Menurut Harahap (2015), pengelolaan kas yang baik membantu perusahaan menghindari kelebihan atau kekurangan dana tunai yang dapat menghambat kegiatan usaha. Analisis kas dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa menimbulkan pemborosan.

Salah satu alat ukur yang sering digunakan dalam analisis ini adalah rasio perputaran kas, yang menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan kas untuk menghasilkan penjualan. Menurut Kasmir (2019:140), rasio perputaran kas digunakan untuk menilai sejauh mana ketersediaan kas mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang serta menutupi berbagai biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan. Perputaran kas merupakan jangka waktu siklus uang tunai yang dimulai sejak dana kas digunakan hingga kembali menjadi kas. Rasio kecepatan kas diperoleh dengan membandingkan jumlah perputaran terhadap rata-rata kas yang dimiliki. Rasio ini berfungsi untuk menilai tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola kas guna menghasilkan pendapatan atau penjualan. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, menunjukkan semakin baik pengelolaan kas. Rumus untuk mencari perputaran kas:

$$\text{Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Kas}}$$

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Hidayat (2019) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran kas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditasnya. Namun, rasio yang terlalu tinggi dapat menandakan

saldo kas yang terlalu kecil, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek (Martono & Harjito, 2018).

b. Analisis Piutang

Analisis piutang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan kredit serta kemampuan perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggan. Piutang merupakan aset lancar yang timbul akibat penjualan secara kredit dan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan arus kas masuk (Kasmir, 2017). Menurut Hery (2018), analisis piutang membantu perusahaan mengetahui seberapa cepat dana yang tertanam dalam piutang dapat kembali menjadi kas. Dengan demikian, manajemen dapat menilai efisiensi penagihan dan risiko piutang tak tertagih.

Salah satu rasio yang umum digunakan adalah rasio perputaran piutang, yang menggambarkan seberapa sering piutang berputar dalam satu periode akuntansi. Analisis sering kali dikaitkan dengan rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang pada perusahaan. Dalam menilai likuiditas piutang, analisis menggunakan yang namanya rasio perputaran piutang (*receivable turnover ratio*). Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan itu menagih piutang selama periode berjalan. Rasio ini nantinya dihitung dengan cara membagi penjualan neto dengan jumlah rata-rata (neto) piutang yang beredar pada tahun berjalan.

Menurut Fransiska, Fauziah, dan Yusuf (2021), perputaran piutang merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan jumlah kas melalui penerimaan pembayaran dari pihak-pihak yang menggunakan barang atau jasa perusahaan. Dengan demikian, perputaran piutang dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menagih dan menerima pelunasan piutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Menurut Kasmir (2017), perputaran

piutang adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa sering dana yang tertanam dalam piutang usaha berputar atau berulang dalam satu periode tertentu. Sehingga perputaran piutang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata-rata Piutang Dagang}}$$

Hasil penelitian Fransiska, Fauziah, dan Yusuf (2021) menunjukkan bahwa perputaran piutang yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan karena mempercepat arus kas masuk. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Putri dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan piutang yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan.

Sebaliknya, jika nilai perputaran piutang rendah, hal ini mengindikasikan lambatnya proses penagihan atau meningkatnya risiko piutang tidak tertagih, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelancaran kas perusahaan (Fahmi, 2016; Rahmawati & Pertiwi, 2022).

Selain itu, analisis piutang juga dilakukan dengan cara melihat umur piutang. Untuk rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Umur Piutang} = \frac{365}{\text{Perputaran Piutang}}$$

Umur Piutang dapat dihitung dengan hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Jika hasil perhitungan umur piutang 60 hari, padahal kebijakan kredit dinyatakan dalam 2/10, n/30, maka kualitas piutang perusahaan tersebut kurang baik.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Makalah ini menjelaskan bahwa instrumen keuangan, kas, dan piutang memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Berdasarkan PSAK 71, setiap instrumen keuangan harus diakui dan diukur secara tepat agar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya serta mendukung pengambilan keputusan yang relevan. Aset keuangan seperti kas dan piutang perlu dikelola dengan cermat karena berpengaruh langsung terhadap likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Dalam pengelolaan kas, penerapan sistem pengendalian internal yang baik, seperti pemisahan tugas, rekonsiliasi bank, dan penerapan sistem imprest kas kecil, menjadi hal penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan efisiensi operasional perusahaan. Sementara itu, piutang harus diakui sebagai hak tagih perusahaan dan dinilai dengan memperhatikan potensi piutang tidak tertagih melalui metode penyisihan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, disarankan agar perusahaan lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi terutama terkait pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71, agar informasi keuangan yang disajikan lebih akurat dan relevan. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal kas melalui pemisahan tugas, rekonsiliasi secara rutin, serta penggunaan sistem imprest kas kecil untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Dalam hal piutang, perusahaan hendaknya melakukan penilaian dan pemantauan secara berkala guna mengantisipasi piutang tak tertagih dan menjaga likuiditas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2020). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Baroroh, N., Winanto, A., Hertina, D., Waty, E., Bibiana, R. P., Amalia, M. M., & Karini, R. S. R. (2023). *Buku ajar akuntansi keuangan menengah 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fransiska, H., Fauziah, R., & Yusuf, R. (2021). PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 2018-2019. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 10(03), 460–471. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i03.14440>
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 60: Instrumen Keuangan – Pengungkapan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriani, M., & Sari, R. (2021). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan Berdasarkan PSAK 50, 55, dan 60. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 45–57.
- International Accounting Standards Board. (2014). *IFRS 9: Financial Instruments*. London: IFRS Foundation.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Depok : Rajawali Pers.
- Kieso,D.E,Weygant,J.J.,&Warfield,T.D.(2017).Intermediate Accounting Volume 1:IFRS Edition.New Jersey: Jhon Wiley & Sons Inc
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting (16th ed.)*. New York: Wiley

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah BERBASIS PSAK* (E. S. Suharsi (Ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica NPS, dkk 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta Salemba Empat.
- Martani, D., Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Martono, & Harjito, D. A. (2018). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sari, D., & Rahmawati, E. (2020). "Implementasi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan pada Industri Perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 345–359.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Toronto: Pearson.
- Setiawan, R., & Putri, A. D. (2022). Penerapan Fair Value dalam Pengukuran Aset Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 411–423.
- Susanto, Y. K., & Nurdin, H. (2019). Pengaruh Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 250–263.
- Stice, E. K., Stice, J. D., & Skousen, K. F. (2019). *Intermediate Accounting* (20th ed.). Cengage Learning.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2017). *Pengantar Akuntansi* (Edisi 26). Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, N., & Hidayat, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Likuiditas Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*

Indonesia,

4(1),

12–22.

https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/2842/1856/12723

STUDI KASUS

Studi Kasus: Analisis Kas dan Piutang pada PT Sejahtera Bersama

PT Sejahtera Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat elektronik rumah tangga, seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan menerapkan strategi penjualan kredit kepada beberapa pelanggan tetap dengan tujuan meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Kebijakan ini terbukti mampu menaikkan angka penjualan perusahaan secara signifikan selama tahun 2024, dengan total penjualan bersih mencapai Rp1.000.000.000.

Meskipun penjualan meningkat, manajemen mulai menyadari adanya penurunan ketersediaan kas di akhir tahun. Berdasarkan catatan laporan keuangan, saldo kas perusahaan pada akhir tahun tercatat sebesar Rp200.000.000, sedangkan saldo piutang usaha mencapai Rp300.000.000. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi manajemen, karena sebagian besar dana perusahaan masih tertahan dalam bentuk piutang yang belum tertagih dari pelanggan.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan data di atas, hitunglah perputaran kas dan perputaran piutang PT Sejahtera Bersama selama tahun 2024!
2. Apa arti jika hasil perputaran kas lebih tinggi dibandingkan perputaran piutang bagi efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan?
3. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan manajemen agar likuiditas perusahaan tetap stabil dan piutang dapat tertagih lebih cepat?